

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan atau pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak, karena pajak merupakan pendapatan yang besar dalam suatu negara.

Berdasarkan wewenang pemungutan pajak, dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dalam pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, yang memberikan hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan terpenting dalam suatu daerah atau kota adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam mengeksploitasi pendapatan daerah adalah seberapa besar kontribusi sektor pajak daerah terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD, yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah atau menyelesaikan masalah pendanaan (Sudarsana, Yasa & Dewi., 2020).

Salah satu fenomena yang mencolok dalam hubungan antara sistem pemerintahan daerah dan pembangunan adalah pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Cheisviyanny (2020) menunjukkan ketergantungan yang tinggi seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi sumatera barat terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah bukti dari belum efektifnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Untuk menghindari ketergantungan bantuan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, setiap daerah diwajibkan untuk menggali potensi-potensi penerimaan yang ada di daerah, yang akan digunakan sebagai pendanaan kegiatan pemerintahannya. Di Indonesia Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan penerimaan pajak tertinggi. Jumlah penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain jumlah

penduduk yang sangat besar, pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat dan berbagai jenis usaha yang ada.

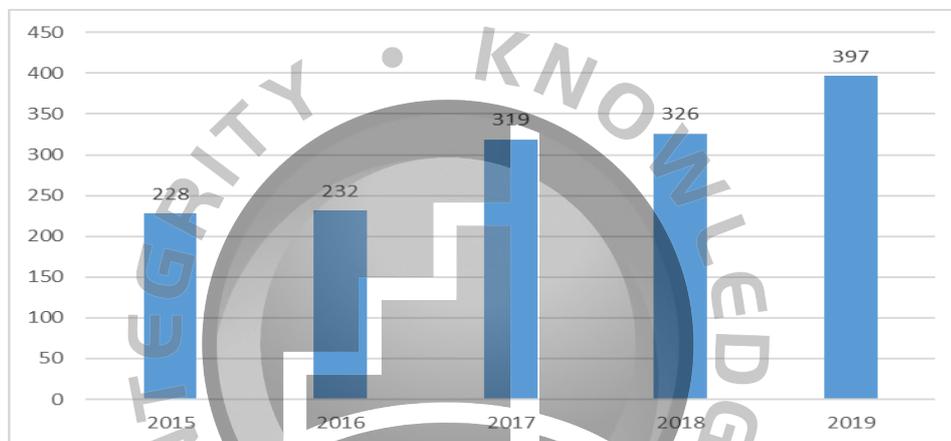
Upaya dalam meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerahnya dalam bidang pembiayaan dan pembangunan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah PAD melalui pajak daerah. Komposisi pajak daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Rokok, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sebagai salah satu ibu kota negara, pusat bisnis dan kota wisata, kota Jakarta menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Pariwisata memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam pembangunan ekonomi. Perekonomian Jakarta juga dikembangkan melalui kegiatan pariwisata. Peran penting kegiatan pariwisata tersebut adalah sebagai potensi sumber pendapatan daerah dan nasional yang cukup potensial.

Para wisatawan yang berkunjung ke Jakarta tentu membutuhkan akomodasi penginapan. Jumlah usaha akomodasi di DKI Jakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 di Jakarta terdapat 991 usaha akomodasi, dimana 397 hotel merupakan hotel berbintang, dan sisanya 594 hotel non bintang. Dari tahun 2015 hingga 2019, jumlah hotel berbintang di DKI Jakarta meningkat sebesar

74,12%, dari 228 hotel pada tahun 2015 menjadi 397 hotel pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 14,87%. (Jakarta.bps.go.id diakses 8 maret 2021).

Seiring dengan bertambahnya jumlah hotel, maka seharusnya penerimaan dari pajak hotel juga akan ikut meningkat. Pada grafik di bawah ini dapat terlihat jumlah hotel bintang di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019 yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



Gambar 1.1 : Jumlah Hotel Bintang di DKI Jakarta 2015-2019

Sumber: Jakarta.bps.go.id (data diolah kembali diakses 21 maret 2021)

Dalam kurun waktu 2015-2019, jika dilihat dari persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi DKI Jakarta, persentase terendah terjadi pada tahun 2015 rata-rata 59,82%, sedangkan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai rata-rata 68,11%. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 1.1 dibawah ini:

Table 1.1
Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang DKI Jakarta
Tahun 2015-2019

Akhir Periode	Hotel Berbintang				
	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	61.49	54.24	63.17	64.74	69.84
Pebruari	51.09	58.64	68.90	62.43	63.37
Maret	65.10	61.78	69.11	61.77	59.56
April	62.78	60.52	65.36	62.91	58.92
Mei	61.75	59.48	68.59	65.61	54.32
Juni	59.98	60.01	59.80	52.48	50.51
Juli	52.28	55.58	65.55	78.79	64.15
Agustus	63.33	69.84	75.14	74.12	58.11
September	56.69	63.01	70.44	68.33	58.97
Oktober	60.27	75.06	70.28	68.72	62.67
Nopember	58.53	68.06	71.31	74.29	64.17
Desember	64.52	62.79	69.68	68.23	61.59
Rata-rata	59.82	62.42	68.11	66.87	60.52

Sumber: jakarta.bps.go.id (data diolah kembali diakes 27 Agustus 2021)

Untuk dapat mengembangkan kegiatan pariwisata di DKI Jakarta, dukungan penyedia makanan dan minuman tentu saja sangat dibutuhkan. Bisnis kuliner saat ini menjadi salah satu yang paling diminati oleh para pebisnis di Jakarta, terlihat dari banyaknya jumlah restoran atau gerai makanan dan minuman yang terdapat disetiap sudut kota. Semakin bertambahnya jumlah usaha restoran, kafetaria atau gerai makanan dan minuman, maka akan menambah kontribusi penerimaan daerah dalam bentuk pajak restoran.

Tarif pajak restoran yang dipungut pemerintah daerah ditetapkan sebesar 10%. Perkembangan jumlah bisnis kuliner di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel jumlah wajib pajak restoran dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2015	9.359
2016	8.130
2017	9.054
2018	9.147
2019	10.906

Sumber: data.jakarta.go.id (data diolah kembali diakses 21 maret 2021)

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun fenomena yang terjadi pada penerimaan pajak restoran di provinsi DKI Jakarta, yaitu masih rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan Yuspin Dramatin menyebutkan di Jakarta Selatan terdapat 730 dari 2.297 restoran yang buka namun masih menunggak pajak (kompas.com diakses 21 maret 2021). Akibat ketidakpatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak, maka realisasi penerimaan pajak restoran pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ikut berkurang.

Kendaraan bermotor yang berperan penting dalam memfasilitasi mobilitas manusia dianggap sebagai kebutuhan primer penduduk Ibukota. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta yang terus meningkat. Pada tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan

dari jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.3
Jumlah Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sedan dan Sejenisnya	188,136	171,246	161,249	156,387	148,746
Jeep Segala Merk	135,578	140,201	147,197	156,491	161,078
Mini Bus, Micro Bus	1,022,224	1,069,593	1,105,855	1,157,440	1,187,735
<i>Pick Up, Light Truck</i> , Truk dan Sejenisnya	111,049	103,466	98,278	96,816	93,920
<i>Bt Wagon, Wagon, Box, Delivery Van</i>	108,224	107,307	107,072	110,346	114,193
<i>Dum Truck</i> , Truk Tangki dan Sejenisnya	23,971	23,816	23,037	23,342	23,294
Otolet/Opelet, Microlet	12,125	11,634	10,570	9,697	9,303
Kendaraan Bermotor Roda Tiga	11,863	13,091	15,018	15,548	17,502
Sepeda Motor	3,002,873	3,035,280	3,088,159	3,232,043	3,267,545
Alat-alat Berat	42,447	43,358	46,377	53,151	58,037
Total	4,658,490	4,718,992	4,802,812	5,011,261	5,081,353

Sumber: PPID DKI Jakarta 2021 (data diolah kembali)

Semakin meningkat jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, maka seharusnya pajak yang diterima dari pajak kendaraan bermotor ikut mengalami peningkatan juga.

Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP).

Pada tahun 2018 muncul sorotan tajam mengenai PBB-P2. Dilansir dari kompas.com, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menaikkan Nilai NJOP di sejumlah

wilayah di Jakarta. Kenaikan NJOP tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Jumlah kenaikan NJOP rata-rata 19,54 persen di enam wilayah DKI Jakarta.

Penetapan kenaikan NJOP akan mendorong kenaikan tarif PBB-P2 yang harus dibayar masyarakat. Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya, oleh karena itu pajak bumi dan bangunan merupakan potensi yang harus dicapai guna meningkatkan pendapatan daerah (Wardani & Fadhli, 2017). Menyadari hal tersebut peneliti pun tertarik untuk menganalisis seberapa besar efektivitas penerimaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.4
Perkembangan Sumber-Sumber PAD Provinsi DKI Jakarta Periode
Tahun 2015-2019 (Nilai Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang sah	Total PAD
2015	29,076,926,598,506	459,459,498,063	527,280,486,037	3,622,510,233,102	33,686,176,815,708
2016	31,613,197,634,662	675,475,066,072	303,204,423,956	4,296,140,463,026	36,888,017,587,716
2017	36,500,782,266,176	624,137,343,759	489,478,684,673	6,287,090,513,134	43,901,488,807,743
2018	37,538,912,327,312	578,555,603,994	592,956,276,353	4,616,712,395,152	43,327,136,602,811
2019	40,298,122,505,326	587,384,031,230	619,456,466,460	4,202,437,000,786	45,707,400,003,802

Sumber: ppid.jakarta.go.id (data diolah kembali)

Berdasarkan data yang tersaji di atas menunjukkan bahwa total penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya dan sumber pendapatan PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa komponen PAD dari sektor pajak daerah menjadi tumpuan utama bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian (Fitriano & Ferina, 2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kota Bengkulu dipengaruhi oleh proporsi yang besar dari pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian yang dilakukan oleh (Sudarsana, Yasa & Dewi, 2020) pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuatif sedangkan pajak restoran mengalami penurunan, efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dalam kategori efektif, sedangkan kontribusinya terhadap PAD dalam kriteria kecil 0%-22.34%. Hasil penelitian dari (Aditya, 2021) menunjukkan penerimaan PKB di Provinsi Jambi belum efektif. Kemudian hasil penelitian (Wardani et al., 2017) efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifan, laju pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, PKB, dan PBB-P2 terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta. Efektivitas, dianalisis dengan melihat realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan. Laju pertumbuhan, dianalisis dengan melihat realisasi penerimaan pendapatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan pendapatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi, dianalisis dengan cara melihat realisasi penerimaan pajak terhadap realisasi PAD.

Peneliti tertarik dalam melakukan penelitian pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 karena melihat potensi dan penerimaan jumlah pajak yang cukup besar di DKI Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini sangat beralasan karena melihat seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan bisnis di DKI Jakarta yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta diuntungkan karena semakin banyaknya jumlah hotel, restoran, dan kendaraan bermotor maka akan menambah jumlah penerimaan pajak daerah, Selain itu PBB-P2 juga menjadi sangat penting dikarenakan memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat dilakukannya penelitian dan jenis pajak yang diteliti. Pada penelitian terdahulu hanya meneliti menggunakan variabel dua jenis pajak daerah sedangkan pada penelitian ini menggunakan empat variabel pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, PKB, dan PBB-P2. Tempat penelitian yang dilakukan pada penelitian ini penulis memilih Provinsi DKI Jakarta yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini karena melihat dari fenomena penerimaan pajak daerah yang tinggi dan berbagai permasalahan yang ada yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulisan skripsi ini secara lengkap ditulis dengan judul **“Analisis Deskriptif Efektivitas, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan**

Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019”.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai:

1. Pada penelitian ini merupakan pengembangan yang berasal dari penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan.
2. Peneliti memfokuskan penelitian hanya pada variabel jenis pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2. Penulisan skripsi ini menggunakan tiga analisis yaitu efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi.
3. Peneliti hanya memfokuskan penelitian di Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya agar peneliti dapat fokus pada bagian tertentu, sehingga data yang diperoleh efektif, spesifik, dan mendalam, serta memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh.

1.3 Identifikasi Masalah

Sumber PAD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan meningkatkan kemandirian daerah. Dalam rangka untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan PAD menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari

dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, muncul berbagai masalah yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 pada Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 pada Provinsi DKI Jakarta?
3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 pada Provinsi DKI Jakarta?

Semua masalah yang ditanyakan merupakan fokus penelitian dan menarik untuk diungkap.

1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel, pajak Restoran, PKB dan PBB-P2 pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019?
2. Bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, Pajak PKB dan PBB-P2 pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019?
3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019?

1.5 Pembatasan Masalah

1. Jenis pajak daerah yang akan diteliti adalah pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2.
2. Tahun pajak yang akan dipakai adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2019
3. Analisis yang akan digunakan adalah analisis efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi.

1.6 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019
2. Untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019
3. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, PKB, dan PBB-P2 terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

1.7 Manfaat Penelitian

1.7.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak daerah, khususnya pada pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2

2. Sebagai pendukung dari teori-teori yang sudah ada yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai analisis efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2 terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2019.

1.7.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam upaya penggalan dan efektivitas pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBB-P2.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian singkat dari isi skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang digunakan melalui berbagai literatur, studi kepustakaan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini juga berisi kerangka pemikiran yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang objek dan subjek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel dan teknik pengolahan dan analisa data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil dari analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam seluruh pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari, kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dalam penelitian ini.

